

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas PMD Kabupaten Sampang menyusun Renja Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

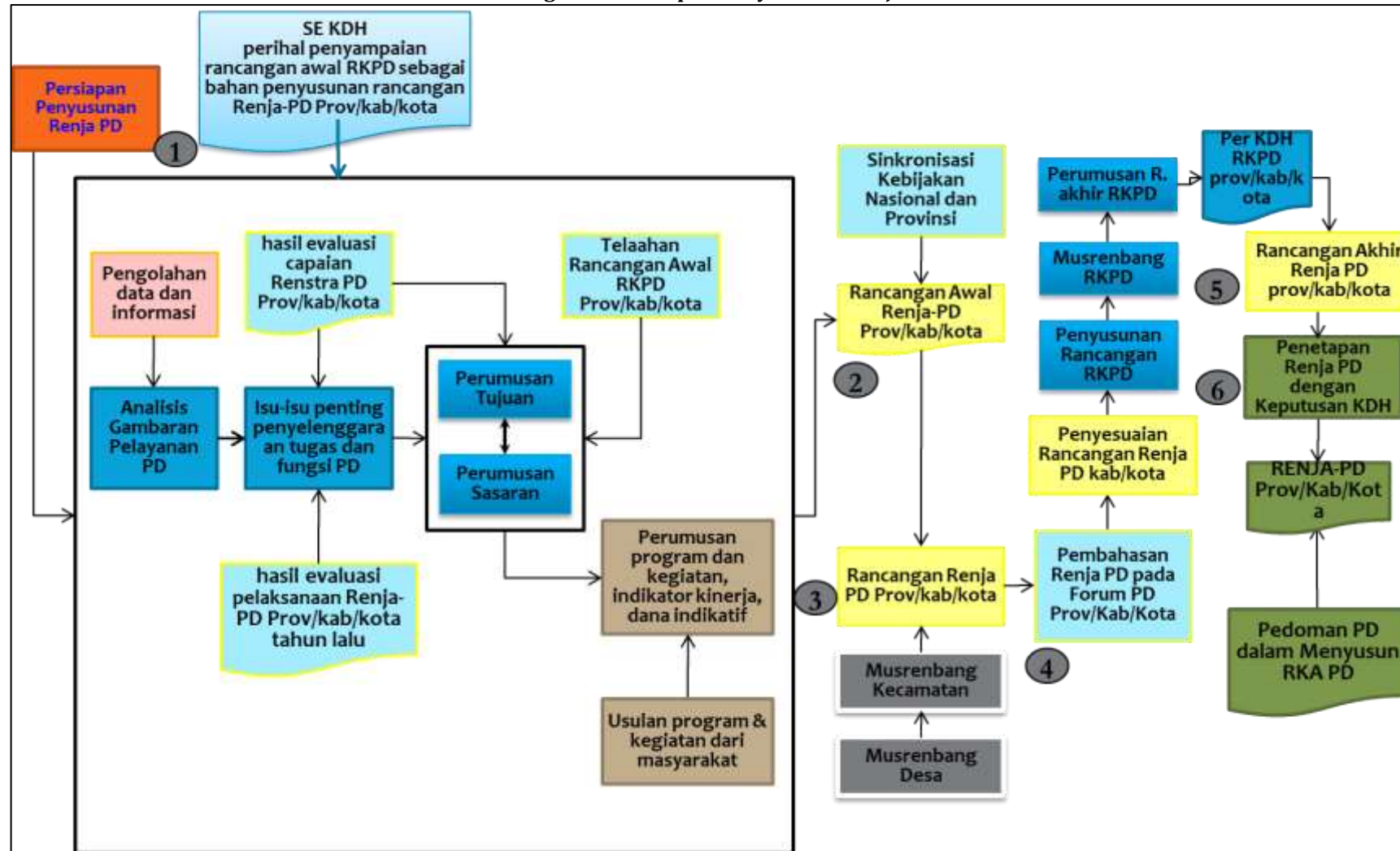
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2024.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Penguatan kontribusi sektor unggulan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas PMD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa serta Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas PMD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik- Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 38. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 1);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 40. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sampang tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2023 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi penilaian kinerja Renja Tahun 2022 dan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Sehingga melalui evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas PMD.

Pelaksanaan evaluasi Renstra Dinas PMD sampai dengan Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan.

Dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024 memuat 5 program dan 12 kegiatan dan 33 subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Program dan kegiatan tersebut dapat diukur penyerapan anggarannya. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas PMD sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PMD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi /d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	31.990.700	22.910.880	15.549.195	15.221.640	97,89	23.181.215	7.709.240	33,25%
	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	5.000.540	9.717.960	6.105.495	6.094.880	99,83	3.623.490	3.623.080	99,98%
	2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun	5.000.540	4.067.800	445.260	444.720	99,88	3.623.490	3.623.080	99,98%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun	5.000.540	652.800	653.985	652.800	99,82	3.623.490	0	0
	2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun	5.000.540	1.115.880	653.985	652.800	99,82	3.623.490	463.080	12,77%
	2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun	5.000.540	652.800	653.985	652.800	99,82	3.623.490	0	0
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun	6.988.000	6.723.640	7.036.485	6.723.640	99,55	5.063.765	0	0
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	4.028.683.140	4.336.037.854	2.975.956.411	2.821.703.051	94,81	3.030.865.866	1.514.334.803	49,96%
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai selama 1 tahun	4.012.487.400	4.317.272.871	2.965.291.585	2.811.048.225	94,80	3.014.641.170	1.506.224.646	49,96%
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan	11.195.200	16.814.488	8.704.331	8.704.331	100	8.112.348	8.110.157	99,97%
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun	5.000.540	1.950.495	1.960.495	1.950.495	99,49	0	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	499.999.847	485.104.700	523.084.742	485.104.700	92,74	0	0	0
	2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.13.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek perundangan-undangan DBHCT yang disosialisasikan	499.999.847	485.104.700	523.084.742	485.104.700	92,74	0	0	0
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	145.045.797	135.885.644	80.892.164	79.620.432	98,43	89.184.956	56.265.212	63,08%
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	4.860.222	8.170.000	6.209.861	6.209.000	99,99	3.675.017	1.961.000	53,36%
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12.365.375	15.124.124	10.569.406	10.548.452	99,80	9.347.314	4.575.762	48,95%
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	7.840.700	11.095.380	5.432.897	5.425.380	99,86	5.670.000	5.670.000	100%
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	4.140.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	100	0	0	0
	2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	7.141.500	5.957.600	3.560.000	3.557.600	99,93	5.400.000	2.400.000	44,44%
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah	112.838.000	92.018.450	51.600.000	50.360.000	97,60	65.092.625	41.658.450	63,99%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	35.544.545	117.911.000	104.111.296	100.950.000	96,96	26.876.616	16.961.000	63,10%
	2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35.544.545	117.911.000	104.111.296	100.950.000	96,96	26.876.616	16.961.000	63,10%
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	235.290.970	261.385.161	213.863.835	195.927.838	91,61	170.500.700	71.002.197	41,64%
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	5.748.850	3.595.000	3.610.000	3.595.000	99,58	0	0	0
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	79.350.970	49.590.161	57.253.835	39.632.838	69,22	57.500.700	15.502.197	26,96%
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	155.940.000	208.200.000	153.000.000	152.700.000	99,80	113.000.000	55.500.000	49,11%
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	272.941.000	192.785.046	158.200.000	154.839.675	97,88	169.750.000	37.945.371	22,35%
	2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	206.321.500	183.539.246	153.100.000	149.739.675	97,81	163.100.000	33.799.571	20,72%
	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	9.177.000	9.245.800	5.100.000	5.100.000	100	6.650.000	4.145.800	62,34%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	57.442.500	0	0	0	0	0	0	0
	2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.13.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan penataan sarana prasarana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik	204.031.518	433.311.364	426.999.095	421.782.294	98,78	154.040.162	11.529.070	7,48%
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa dengan perawatan sarana dan prasana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik	204.031.518	433.311.364	426.999.095	421.782.294	98,78	154.040.162	11.529.070	7,48%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah kegiatan TMMD yang dilaksanakan dan rakor sarpras dan pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan	204.031.518	433.311.364	426.999.095	421.782.294	98,78	154.040.162	11.529.070	7,48%
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase BUMDes yang berkembang	52.056.333	24.440.157	0	0	0	37.959.324	24.440.157	64,38%
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Persentase BUMDes Bersama yang aktif	52.056.333	24.440.157	0	0	0	37.959.324	24.440.157	64,38%
	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan BUMDesma (BUMDes bersama) yang dilaksanakan	52.056.333	24.440.157	0	0	0	37.959.324	24.440.157	64,38%
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	3.443.847.000	4.145.464.294	3.110.286.861	3.051.458.864	98,11	2.532.625.688	1.094.005.430	43,19%
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan tata administrasi desa yang baik dan tepat waktu	3.443.847.000	4.145.464.294	3.110.286.861	3.051.458.864	98,11	2.532.625.688	1.094.005.430	43,19%
	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa	212.337.686	192.513.600	193.034.260	192.513.600	99,73	0	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi mengenai produk hukum pemerintahan desa dan jumlah aparatur yang dilatih	66.720.052	57.846.000	58.017.436	57.846.000	99,70	0	0	0
	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek penyusunan perencanaan pembangunan desa	98.900.000	87.141.000	87.821.406	87.141.000	99,23	0	0	0
	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah operator yang mendapatkan pelatihan penginputan data SISKUEDES dan OMSPAN	69.265.938	69.023.000	53.117.573	53.023.000	99,82	52.375.000	16.000.000	30,54%
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi, dan jumlah desa yang perangkat desanya mendapatkan jaminan kesehatan BPJS	3.120.122.498	3.151.745.284	2.179.741.946	2.140.216.804	98,19	2.315.782.598	1.011.528.480	43,67%
	2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jmah operator yg dibimtek evaluasi pengelolaan keuangan desa	66.720.052	73.419.300	59.378.506	59.167.500	99,64	28.425.670	14.251.800	50,13%
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades serentak		411.069.320	425.957.718	411.069.320	96,50	0	0	0

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.04.2.01.10	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang anggota BPDnya berakhir dan jumlah pembaharuan perangkat desa	82.858.719	21.852.100	21.903.351	21.852.100	99,77	60.042.550	0	0
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan aset	Jumlah aparatur desa yang dibina tata aset desa	104.879.793	66.627.650	14.606.430	14.402.500	98,60	75.999.850	52.225.150	68,71%
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa/kel	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa terbaik	90.824.700	14.227.040	16.708.235	14.227.040	85,15	0	0	0
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan ekonomi Desa yang aktif	1.878.929.628	1.199.244.181	850.741.258	784.996.355	92,27	1.477.140.952	414.247.826	28,04%
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	'Persentase lembaga kemasyarakatan (LK) dan lembaga pengembangan ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan peningkatan kelembagaan	1.878.929.628	1.199.244.181	850.741.258	784.996.355	92,27	1.477.140.952	414.247.826	28,04%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024	Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021			Target Kinerja Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d. Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra
										(tahun n-1)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah konsultasi dan koordinasi terkait lembaga tradisi masyarakat	47.010.431	10.751.432	7.500.389	6.584.350	87,79	34.065.528	4.167.082	12,23%
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) yang dilatih	189.060.335	228.846.090	193.882.490	188.596.740	97,27	137.000.092	40.249.350	29,37%
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah BUMDesa yang dibentuk (180 BUMDesa), jumlah pengurus BUMDEs yang dilatih, dan monitoring dan pembinaan yang dilakukan	115.918.560	149.028.294	119.598.721	112.711.910	94,24	158.998.957	36.316.384	22,84%
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah pameran dan lomba TTG nasional yang diikuti dan jumlah workshop TTG yang dilaksanakan	96.599.790	92.432.600	64.014.024	62.384.000	97,45	69.999.845	30.048.600	42,92%
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan lomba gotong royong yang dilaksanakan dan jumlah	141.763.235	67.259.617	54.428.792	53.703.190	98,67	102.726.982	13.556.427	13,16%

			kelompok gotong royong yang mendapatkan pembinaan								
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah 10 Program pokok PKK yang dilaksanakan, Jumlah jambore dan Pelatihan kader PKK yang dilaksanakan	1.288.577.277	650.926.148	411.316.842	361.016.165	87,77	974.349.548	289.909.983	29,75%	

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas PMD sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019-2024 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas kegiatan. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan Permendagri No. 50 tahun 2020
3. Serapan kegiatan pada tahun 2021 mencapai Rp. 8.111.604.849 atau 95,489 persen dari total anggaran sebesar Rp. 8.459.684.857 dengan rincian sebagai berikut; Belanja langsung sebesar Rp. 5.494.393.274 terealisasi sebesar Rp. 5.300.556.624 atau 96,47 persen. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.965.291.585 terealisasi sebesar Rp. 2.811.048.225 atau 96,47 persen.
4. Sedangkan untuk serapan program dan kegiatan pada tahun 2022 hingga 30 Juni 2022 (Semester I), dari total anggaran Rp. 7.704.013.111 baru terserap Rp. 3.248.440.306 atau sekitar 42%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Desa kategori Mandiri	n/a	n/a	0	0	3	5	0	0	3	5	
2	Persentase Desa Kategori Maju	n/a	n/a	10%	13,89%	16,67%	19,44%	10%	13,89%	16,67%	19,44%	
3	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu dan tepat waktu	n/a	n/a	57,41	62,96	79,81	96,29	57,41	62,96	79,81	96,29	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas PMD sebagai dinas yang memiliki tugas pokok di membantu bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
2. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Dinas PMD;
3. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Dinas PMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Peningkatan kualitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi.

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2023 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang

dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan kebutuhan riil Dinas PMD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas PMD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sampang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023					HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS PMD TAHUN 2023				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
02.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			9.994.781.865					7.969.005.968	
2.13.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Persentase Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	3.995.405.185	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMD	Persentase Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.216.118.446
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat	100%	27.817.458	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat	100%	11.000.000
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	7 dokumen	4,348,188	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	7 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	10 dokumen	4,348,188	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	10 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat	10 dokumen	4,348,188	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat	10 dokumen	1.000.000
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat	29 dokumen	4,348,188	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat	29 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat	7 dokumen	4,348,188	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat	7 dokumen	1.000.000
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	7 dokumen	6,076,518	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	7 dokumen	3.000.000
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.324.801.654	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	3.016.641.170
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan	12 bln	3,316,105,278	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan	12 bln	3.014.641.170
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dibuat	5 laporan	4,348,188	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang dibuat	5 laporan	1.000.000
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	9 laporan	4,348,188	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	9 laporan	1.000.000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepedawaian yang dilaksanakan	100%	20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepedawaian yang dilaksanakan	100%	20.000.000

2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	20.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	20.000.000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan	100%	124.938.773	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan	100%	134.882.818
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen listrik yang tersedia	6 paket	4,226,273	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen listrik yang tersedia	6 paket	4.000.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15 unit	10,752,500	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15 paket	10.000.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 paket	9.734.818
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia	10 dokumen	5.630.000	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia	9 paket	6.818.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah kunjungan tamu selama 1 tahun	400	6.210.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah laporan kunjungan tamu selama 1 tahun	400 laporan	6.210.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	100 paket	98.120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	100 paket	98.120.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	30.908.300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang tersedia	100%	20.000.000
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia	25 unit	30.908.300	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia	6 unit	20.000.000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	209.599.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang urusan PD yang dilaksanakan	100%	175.500.000
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	550	4,999,000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	550	2.500.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar	12 bulan	69,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar	12 bulan	60.000.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah pelayanan umum yang tersedia	100	135.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum yang tersedia	12 laporan	113.000.000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik negara daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik negara yang terpelihara dengan baik	100%	237.340.000	Pemeliharaan Barang Milik negara daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang milik negara yang terpelihara dengan baik	100%	181.980.000
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah jasa servise kendaraan operasional dan perepanjangan STNK roda 2 dan roda 4	12 unit / 2 unit	179,410,000	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Jumlah jasa servise kendaraan operasional dan perepanjangan STNK roda 2 dan roda 4	44 unit	164.000.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah jasa servise peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit	7.980.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		13 unit	30 kali	7.980.000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 unit	49,950,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 unit	10.000.000
2.13.01.2.13	Penataan Organisasi		Persentase penataan organisasi yang baik	100%	20.000.000	Penataan Organisasi		Persentase penataan organisasi yang baik	100%	500.000

2.13.01.2.13.02	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pelayanan publik dan tata laksana	2 laporan	20.000.000	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pelayanan publik dan tata laksana	2 laporan	500.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang	61,67%	177,418,720	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang	61,67%	175.000.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan sarana prasarana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik	100%	177,418,720	Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan sarana prasarana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik	100%	175.000.000
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah dokumen fasilitasi sarana dan prasarana desa yang dibuat	3 dokumen	177,418,720	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah dokumen fasilitasi sarana dan prasarana desa yang dibuat	3 dokumen	175.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		1. Persentase BKAD yang aktif 2. Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk	1. 80% 2. 4 unit	43,380,777	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		1. Persentase BKAD yang aktif 2. Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk	1. 80% 2. 4 unit	30.000.000
2.13.03.2.01	Fasiitasi Kerjasama Antar Desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100%	43,380,777	Fasiitasi Kerjasama Antar Desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100%	30.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		43,380,777	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		a) Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik b) Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik c) Persentase desa dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik	100 88,89% 100%	4.094.725.297	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		a) Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik b) Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik c) Persentase desa dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik	100 88,89% 100%	2.728.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase penyelenggaraan pengawasan administrasi dokumen administrasi desa yang baik	100%	800.080.909	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase penyelenggaraan administrasi dokumen administrasi desa yang baik	100%	2.728.000.000
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibuat Jumlah operator kecamatan yang mendapatkan Bimtek administrasi pemerintahan desa	3 dokumen 14 orang	193,034,260	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Jumlah dokumen fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibuat Jumlah operator kecamatan yang mendapatkan Bimtek administrasi pemerintahan desa	3 dokumen 14 orang	50.000.000
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa		Jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dibuat	3 dokumen 180 desa	86,000,000	Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa		umlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dibuat	180 desa 3 dok	30.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dibuat	2 data 3 dok	60,231,250	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dibuat	2 data 3 dok	60.000.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan peningkatan kapasitas aparat desa		Jumlah aparat desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi Jumlah aparat desa yang mendapatkan BPJS kesehatan Jumlah rakor bagi aparat desa yang dilaksanakan	360 orang 180 orang 14 kali	2,713,149,998	Pembinaan peningkatan kapasitas aparat desa		Jumlah aparat desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi Jumlah aparat desa yang mendapatkan BPJS kesehatan Jumlah rakor bagi aparat desa yang dilaksanakan	360 orang 180 orang 14 kali	2.400.000.000

2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa		Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang dibuat	3 dok	0	Evaluasi dan pengawasan peraturan desa		Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa yang dibuat	3 dok	28.000.000
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa		Jumlah laporan fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang dibuat	1 laporan	72,051,060	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa		Jumlah laporan fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa yang dibuat	1 laporan	70.000.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset desa		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	3 dokumen	91,199,820	Fasilitasi Pengelolaan Aset desa		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	3 dokumen	60.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi evaluasi perkembangan dsesa serta lomba desa dan kelurahan		Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa yang dibuat	3 dokumen	78,978,000	Fasilitasi evaluasi perkembangan dsesa serta lomba desa dan kelurahan		Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa yang dibuat	3 dokumen	30.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	1.633.851.886	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100	1.475.501.980
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan	100%	1.633.851.886	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan	100%	1.475.501.980
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Jumlah Lembaga tradisi masyarakat yang terbentuk	3 dokumen 2 lembaga	40,878,636	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat Jumlah Lembaga tradisi masyarakat yang terbentuk	3 dokumen 2 lembaga	35.000.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah rakor forum KPM yang dilaksanakan	180 lembaga 14 keg	164,400,292	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah rakor forum KPM yang dilaksanakan	180 lembaga 14 keg	75.000.000
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3 dok	100,798,750	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3 kali	75.000.000

2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah lomba TTG yang diikuti	1 laporan, 1 keg	83,999,850	Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah lomba TTG yang diikuti	1 laporan, 1 keg	70.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah laporan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	123,272,378	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah laporan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	100.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Jumlah dokumen hasil Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Jumlah penanganan stunting yang dilaksanakan	3 dokumen 1 keg	1,120,501,980	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga		Jumlah dokumen hasil Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Jumlah penanganan stunting yang dilaksanakan	3 dokumen 1 kegiatan	1.120.501.980

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2023 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas PMD Tahun 2023.

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

Perangkat Daerah : Dinas PMD Kabupaten Sampang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas PMD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) **Tahun 2023** dengan Tema "**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**".

Dinas PMD sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2023

NO.	NASIONAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan	Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan
			Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional
2	Infrastruktur dan pemerataan wilayah	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana
3	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	
4	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja	Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas PMD Tahun 2023 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas PMD yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PMD pada Tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2023

No.	TUJUAN/SASARAN	TUJUAN/SASARAN		TARGET TAHUN 2023	
1	2	3		4	
	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif				
	Tujuan: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
	Sasaran: Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,722
	KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
	Tujuan: Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa	1	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,722
	Sasaran: Meningkatnya Keswadayaan dan kemajuan asyarakat Desa	1	Persentase Desa Kategori Mandiri	%	2,78
		2	Persentase desa kategori maju	%	19,44
	Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik				
	Tujuan: Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik				
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	1	Persentase desa dengan tata kelola aministrasi pemerintahan desa yang baik	%	94,44
	KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
	Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	1	Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik	%	94,44
	Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola administrasi , keuangan dan aset desa	1	Persentase Desa dengan dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan administrasi dan aset yang benar dan tepat waktu	%	96,29

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2023

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas PMD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas PMD mendukung pada pencapaian **misi 2** yaitu **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat”** dan **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PMD yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024, Dinas PMD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2 dan 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penataan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas PMD Tahun 2023 sebagaimana terlampir

sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

d. Tabel Rencana Program Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Sampang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tarhet				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7,969,005,968		10,695,895,550				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,560,503,988		4,742,461,312				
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11,000,000		31,990,700				
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	0 Dokumen 8 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	16 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Dokumen	100 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Dokumen	100 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	8 Laporan	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	6,988,000
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,016,641,170				4,022,488,480	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	31 Orang/bu	100 persen	3,014,641,170	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	4,012,487,400

2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Laporan	100 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Laporan	100 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,000,540
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							20,000,000					30,000,000	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Orang	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	30,000,000
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							134,882,818					155,045,797	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Paket	100 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	4,860,222
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	15 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	12,365,375

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Paket	100 persen	9,734,818	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	10,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	9 Paket	100 persen	6,818,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	7,840,700
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 Laporan	100 persen	6,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	7,141,500
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	35 Laporan	100 persen	98,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	112,838,000
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000					35,544,545
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Unit	100 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	35,544,545

2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								175,500,000					164,450,790	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	550 Laporan	100 persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	5,748,850
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	79,350,970
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	100 persen	113,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	79,350,970
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								181,980,000					272,941,000	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	44 Unit	100 persen	164,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	206,321,500
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	13 Unit	100 persen	7,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	9,177,000

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Unit	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	57,442,500
2	13	01	2.13		Penataan Organisasi							500,000					30,000,000	
2	13	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	100 persen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 persen	30,000,000
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA							175,000,000					204,031,518	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa							175,000,000					204,031,518	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase desa dengan tata kelola BUMDes yangbaik Persentase desa dengan tata kelola BUMDes yangbaik	Jumlah Kegiatan Sarana Kegiatan TMMD Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah sarana dan prasarana desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 61,67 persen	1 kegiatan 180 Unit	180 unit	175,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan tata kelola BUMDes yang baik Persentase desa dengan tata kelola BUMDes yang baik	100 persen 61,67 persen	204,031,518
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							30,000,000					52,056,333	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							30,000,000					52,056,333	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase BKAD yangaktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang memiliki BKAD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 persen	1 Dokumen	4 unit	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase BKAD yang aktif	80 persen	52,056,333
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							2,728,000,000					3,818,416,759	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							2,728,000,000					3,818,416,759	

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah operator kecamatan yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen 14 Orang	180 Desa	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	212,337,686
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen	180 Desa	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	98,900,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Kumpulan input data SISKEUDES dan OMSPAN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen 2 data	180 Desa	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	69,265,938

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jumlah desa yang perangkat desanya mendapatkan jaminan kesehatan BPJS Jumlah Rakor penyelenggaraan pemerintahan desa bagi aparatur pembina desa tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	360 Orang 180 Desa 14 kegiatan	180 Desa	2,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	3,120,122,498
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen	180 Desa	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	39,227,425
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	1 Laporan	180 Desa	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	82,858,719

2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen	180 Desa	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	104,879,793
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,89 persen 100 persen	3 Dokumen	180 Desa	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik	88,89 persen 100 persen	90,824,700
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1,475,501,980			1,878,929,628	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,475,501,980			1,878,929,628	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) Desa yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Tradisi Masyarakat (LTM) yang terbentuk	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dan lembaga ekonomi yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan (PKK, KPMD, KGR, LTR, Posyandu, BUMDes dan UPKu)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Desa	3 Dokumen 2 Lembaga	180 Desa	35.000.000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) Desa yang aktif	180 Desa	47,010,431
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) Desa yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dan lembaga ekonomi yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan (PKK, KPMD, KGR, LTR, Posyandu, BUMDes dan UPKu)	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180 Desa	180 Lembaga 14 Kecamatan	180 Desa	75,000,000	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) Desa yang aktif	180 Desa	189,060,335

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas PMD mengampu urusan Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program-program Dinas PMD pada Tahun 2023 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Tahun 2023

Kode	Uraian/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Pagu Pendanaan 2023 (Rp.)
1	2	3	4	5
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			7.969.005.968
2.13.01	Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kab/kota			3.560.503.988
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat	100%	11.000.000
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat	8 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	16 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat	8 dokumen	1.000.000
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat	15 dokumen	2.000.000
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat	8 dokumen	1.000.000
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat	8 dokumen	3.000.000
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan keuangan perkantoran	100%	3.016.641.170
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan	12 bln	3.014.641.170
2.13.01.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 laporan	1.000.000

2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	9 laporan	1.000.000
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100%	20.000.000
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	20.000.000
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum OPD	100%	134.882.818
2.13.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	4.000.000
2.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	15 unit	10.000.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 paket	9.734.818
2.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket	6.818.000
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu selama 1 tahun	100 laporan	6.210.000
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	35 laporan	98.120.000
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	20.000.000
2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia	6 unit	20.000.000
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	175.500.000
2.13.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan surat menyurat yang disediakan	550 laporan	2.500.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar	12 bulan	60.000.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pelayanan umum yang tersedia	12 laporan	113.000.000

2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	181.980.000
2.13.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan aatau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	44 unit	164.000.000
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharhan	13 unit	7.980.000
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi	1 unit	10.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang berkembang	61,67%	175.000.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Prosentase penyelenggaraan tata aset BUMDEs yang baik	100%	175.000.000
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi sarana dan prasarana desa	Jumlah sarana dan prasarana desa yang dibuat	100%	175.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	1. Persentase BKAD yang aktif 2. Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk	80% 4 unit	30.000.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi kerjasama antar desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100%	30.000.000
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan yang dibuat	1 dok	30.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	a) Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik b) Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik c) Persentase desa dengan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik	100% 88,89% 100%	2.728.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang baik	100%	2.728.000.000
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah aparatur yang mendapatkan bimtek administrasi pemdes	180 Desa	50.000.000
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi	180 desa	30.000.000
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN	2 data	60.000.000

2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang dibina terkait tupoksi, jumlah aparatur desa yang mendapat BPJS, dan jumlah rakor penyelenggaraan pemdes yang dilaksanakan	360 orang	2.400.000.000
2.13.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Monitoring dan evaluasi perdes yang dilaksanakan	180 desa	28.000.000
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dibuat	1 laporan	70.000.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan aset desa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dok	60.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan	Jumlah evaluasi kegiatan lomba desa dan kelurahan	3 dok	30.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	1.475.501.980
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	1.475.501.980
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	3 dok dan 2 lembaga	35.000.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi deas yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan	180	75.000.000

2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah dokumen Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	3 dok	75.000.000
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya keikutsertaan posyantek desa dalam ajang pameran TTG	1 paket	70.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kegiatan BBGRM yang dibuat	1 dok	100.000.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan program pokok PKK yang dilaksanakan, jumlah jambore kader PKK yang dilaksanakan, jumlah monitoring dan pembinaan PKK yang dilaksanakan, jumlah pemilihan kader terbaik PKK yang dilaksanakan, jumlah resepsi HKG yang dilaksanakan	186 desa/kel	1.120.501.980

Pada tahun 2023 Dinas PMD akan melaksanakan Urusan Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp. 7.969.005.968,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.014.641.170,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.954.364.798,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program, 12 kegiatan dan 40 Sub kegiatan**. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

Inovasi SKPD

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan memaksimalkan kinerja perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa juga mengembangkan inovasi dalam beberapa kegiatannya. Setidaknya ada 5 inovasi kegiatan yang diluncurkan DPMD, antara lain:

1. SI GONDRONG

Merupakan inovasi dari sub kegiatan fasilitasi bulan bhakti gotong royong. Si Gondrong merupakan peran aktif masyarakat desa dalam keswadayaan desa dalam mempercepat pembangunan daerah. Pengeaplikasian sistem informasi gotong royong (SI GONDRONG) sebagai kontrol pelaksanaan gotong royong di desa.

2. PUSAKA BUMDES

Dalam upaya meningkatkan usaha ekonomi desa perlu meningkatkan pengembangan badan usaha milik desa. Sebab masih terdapat 103 BUMDEs dalam kategori pemula yang perlu didorong untuk menjadi BUMDes berkembang. Untuk mengoptimalkan informasi teknologi dalam pengembangan BUMDesa dibuatlah sebuah aplikasi bernama PUSAKA BUMDES. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan Monitoring dan evaluasi BUMDes sebagai bentuk asistensi pengelolaan BUMDes.

3. SI MANIS DESA

Merupakan aplikasi sistem manajemen administrasi desa dari sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan aset desa. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan tata kelola pengadministrasian desa.

4. TALANGAN SASITA

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, pengelolaan tata keuangan desa juga mulai bergeser dari bentuk fisik ke digital. Melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dikembangkan tata kelola keuangan berbasis digital untuk meningkatkan pengelolaan aplikasi keuangan di desa.

5. SIMPEDES

Hingga saat ini profil perangkat desa belum terdata dengan baik. Untuk itu perlu dilakukan pendataan sehingga mempermudah melakukan evaluasi dan monitoring kinerja perangkat desa. Melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dikembangkan sistem manajemen perangkat desa (SIMPEDES) untuk membuat basis data perangkat desa.

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM AKSI	SUB KEGIATAN (Berdasarkan Keppmendagri 050-3704/2020)	PROGRAM PRIORITAS (INOVASI) (Berdasarkan Keppmendagri 050-3704/2020)	ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp.)
Jumlah Desa Mandiri masih sangat rendah	Perubahan status desa desa maju ke desa mandiri	Penginputan data IDM berbasis aplikasi	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pembentukan BUMdesma dan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan	30.000.000
masih rendahnya kemampuan desa dalam pengelolaan pembangunan kawasan perdesaan	Pengelolaan dan pengembangan lembaga BUMDESma	pembentukan lokasi kawasan perdesaan			
		pembentukan BKAD			
Pembentukan desa Mandiri perlu didorong dengan terbentuknya lembaga Adat Perdesaan dan aktifnya kegiatan adat yang mendukung pengembangan ekonomi. Sedangkan lembaga adat di kabupaten sampang masih rendah	Perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi lembaga adat desa/Lembaga tradisi masyarakat untuk menggali potensi masyarakat di bidang tradisi	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat Hukum Adat	Pembentukan lembaga Kemasyarakatan Adat Desa (LKAD)	35.000.000
	Perlu peran aktif masyarakat desa dalam keswadayaan desa dalam mempercepat pembangunan daerah	Fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	(INOVASI) Pengaplikasian sistem informasi gotong royong (SI GONDRONG) sebagai kontrol pelaksanaan gotong royong di desa	100.000.000

		Pengeaplikasian sistem informasi gotong royong (SI GONDRONG) sebagai kontrol pelaksanaan gotong royong di desa			
Masih ada 103 BUMDEs dalam kategori pemula yang perlu didorong untuk menjadi BUMDes berkembang	Pengembangan Usaha BUMDes	Pengadaan Bumtek Managemen Pengelolaan Keuangan BUMDes	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	(INOVASI) Pembinaan BUMDes secara langsung dan melalui aplikasi PUSAKA BUMDES	75.000.000
		Monitoring dan evaluasi BUMDes sebagai bentuk asistensi pengelolaan BUMDes			
masih terdapat 86 LPMD yang belum tertata sesuai standar	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) merupakan salah satu penopang pengembangan pemberdayaan ekonomi desa terutama dalam meningkatkan penghasilan masyarakat desa	peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM) di desa/kelurahan dengan indentifikasi dan invetarisasi warga yang potensial menjadi kader (terutama perempuan) dengan pelatihan kader	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	memfasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) berprestasi untuk lomba KPM tingkat propinsi	75.000.000
Minimalnya kader pemberdayaan masyarakat (KPM) di desa/kelurahan					
Persentase Desa dengan tata kelola yang baik belum optimal	perlu dibuatkan aplikasi untuk menginput data perangkat desa dengan aplikasi SIPADES dan SIMANIS DESA dan pembinaan operator aplikasi desa sebab masih sebagian desa yang menggunakan aplikasi tersebut	Pembinaan dan pengawasan pengelenggaraan administrasi pemerintahan	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	(INOVASI) Pengaplikasian SIPADES (Sistem Penataan Aset Desa dan SIMANIS (Sistem manajemen administrasi) DESA	60.000.000

Rendahnya kemampuan pengelolaan aplikasi keuangan di Desa	Perkembangan teknologi informasi keuangan yang semakin berkembang	membuat Tata Kelola keuangan Desa berbasis digital (Talangan Sasita)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	(INOVASI) Membuat Tata Kelola keuangan Desa berbasis digital (TALANGAN SASITA)	60.000.000
belum optimalnya penggunaan aplikasi keuangan desa	Perkembangan teknologi informasi keuangan yang semakin berkembang	Melakukan evaluasi dan monitoring tata keuangan desa dan perdes	Evaluasi dan Pengawasan Perdes	pengoptimalisasian aplikasi SISKUEDES	28.000.000
hingga saat ini profil perangkat desa belum terdata dengan baik	manajemen perangkat desa perlu ditingkatkan	evaluasi dan monitoring perangkat desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	(INOVASI) Membuat sistem manajemen perangkat desa (SIMPEDES) untuk membuat basis data perangkat desa	70.000.000
JUMLAH (Rp.)					533.000.000

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2023 yaitu **“Penguatan kontribusi sektor unggulan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas PMD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.”**

Hasil evaluasi atas Renja Dinas PMD Kabupaten Sampang tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 87,41% atau dapat dikategorikan sangat baik. Sedangkan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2022 hingga 30 Juni 2022 (semester I) adalah 42%. Berkenaan dengan hal tersebut memang perlu ada peningkatan penyerapan anggaran agar pada akhir tahun anggaran kinerja program/kegiatan dapat tercapai optimal.

Untuk Renja Dinas PMD Tahun 2023 haruslah dilaksanakan dengan efisien, konsisten, dan sinergi dengan tujuan dan sasaran Dinas PMD yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas PMD adalah **“Meningkatkan Kemandirian Desa serta Tata Kelola Pemerintahan Desa”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Menguatkan Keswadayaan dan kemandirian masyarakat Desa dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.**

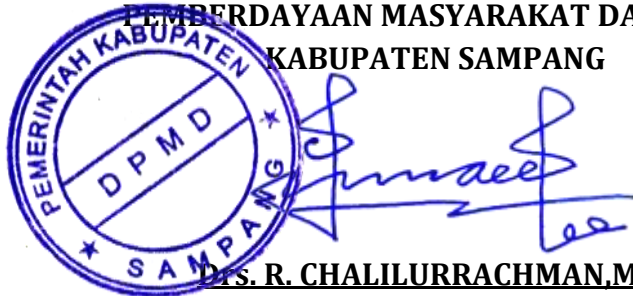
Pada tahun 2023 Dinas PMD akan melaksanakan Urusan Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp. 7.969.005.968,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.014.641.170,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.954.364.798,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 5 program, 12 kegiatan dan 40 Sub kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2023, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan langkah tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SAMPANG**



Drs. R. CHALILURRACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP 19691102 199003 1 004